



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : DYAH KUSUMAWARDANI
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 720161

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 14.5 m²/10.6 m² di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 45.000.000

- MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
- MOTOR, HONDA REVO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- MOBIL, CHEVROLET OPTRA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.662.107

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 314.662.107

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 314.662.107

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KRISTI MARYUNANI, AKS
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 715139

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 97.75 m2/70 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 24.550.000

1. MOTOR, SHOGUN R 125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000
2. LAINNYA, SEPEDA DETROID II MTB Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.450.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 120.949.328

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 626.949.328

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 626.949.328

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
UNIT KERJA : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NENI TRIYANA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
3. NHK : 718871

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.870.000.000

1. Tanah Seluas 270 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 219 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. Tanah Seluas 143 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. Tanah Seluas 1810 m2 di BOYOLALI, WARISAN Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 100 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
6. Tanah Seluas 196 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 655.500.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5G A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA F1CO2N28LO A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
3. MOTOR, HONDA D1BO2N12L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
5. LAINNYA, POLYGON ROAD BIKE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000



6. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
457.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	35.049.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.610.549.000
III. HUTANG	Rp.	380.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.230.549.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROSA DELIMA DAMAI RITA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
3. NHK : 792382

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 330.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m²/54 m² di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 203.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY/MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOBIL, SUZUKI MANUAL/GX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 77.538.906

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 619.538.906

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 619.538.906

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.